

Aspek perlindungan hukum bagi sumber daya hayati terhadap ancaman biopiracy = Legal protection aspect for the biological resources against biopiracy threat / Radhiyatuz Zahra

Radhiyatuz Zahra, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20404039&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah dibangun oleh negara maju dan dituangkan melalui TRIPs Agreement ternyata menimbulkan beberapa pertentangan kepentingan antara negara maju yang menguasai pengetahuan dan teknologi dengan negara berkembang terkait dengan pemberian perlindungan terhadap pengetahuan tradisional. Negara berkembang sering sekali mengeluh tentang pembajakan HKI dalam bentuk pelanggaran paten, hak cipta oleh produsen negara-negara maju. Paten hanya memberi perlindungan kepada penemu teknologi tanpa mempertimbangkan bahwa penemuan tersebut dikembangkan dengan menggunakan sumber daya alam maupun pengetahuan tradisional. Pembajakan dalam sumber daya hayati disebut dengan Biopiracy. Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam tentang sistem perlindungan yang efektif untuk melindungi pengaturan Pengetahuan Tradisional, Upaya-upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam melindungi ancaman biopiracy, dan apakah Undang-undang Paten No. 14 tahun 2001 sudah cukup dalam mengatur perlindungan terhadap Sumber Daya Hayati. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan materi atau bahan hukum dan bersifat kualitatif dan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa sistem perlindungan yang efektif untuk melindungi pengaturan Pengetahuan Tradisional dengan adanya Sistem Sui Generis berdasarkan pada tradisi yang berkembang di tengah masyarakat asli. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah mencapai tahap penyusunan draf Naskah Akademik dan draf Rancangan Undang-undang (RUU), yakni RUU tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional. Perlindungan HKI terhadap Pengetahuan Tradisional dan Sumber Daya Hayati dengan memanfaatkan Undang-undang Paten No. 14 Tahun 2001 belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan hukum karena di dalam Paten suatu invensi harus memenuhi syarat patentability.

<hr>

ABSTRACT

Intellectual Property Rights (IPR), which has been built by the developed countries and stated in the TRIPs Agreement had caused some wishful interests pertent between developed countries that dominate the knowledge and technology and developing countries associated with the provision of protection of traditional

knowledge. Developing countries often complain about IPR piracy in the form of patent infringement, copyright by manufacturers of the developed countries. Patents only provide protection to the inventor of the technology without considering that the invention was developed using biological resources and traditional knowledge. Piracy in the biological resources referred to Biopiracy. The goals to be achieved from this research is to examine and analyze more deeply about the effective protection system to protect the Traditional Knowledge regulation, some efforts have been done by the government in order to avoid biopiracy threats, and is Patent Law No. 14, 2001 sufficient to regulate the protection of Biological Resources. The approach used in this research is normative juridical method with the law material or resource and it is qualitative and descriptive research. Based on the research results, it can be concluded that the effective protection system to protect Traditional Knowledge regulation is using the System of Sui Generis based on a tradition that developed in the middle of the indigenous people. The efforts that have been done by the government has reached the stage of the drafting of an academic paper and the Constitution draft (Bill), namely the Bill on the Protection and Use of Knowledge and Traditional Cultural Expressions. Protection of Traditional Knowledge and Intellectual Property Rights to Biological Resources utilizing Patent Law No. 14 of 2001 has not been fully able to provide lawful protection because in the patent, an invention must meet the patentability.